

MEMBUMIKAN MULTIKULTURALISME

Imam Bukhori

Abstract: *The process of multiculturalism earthing is an interesting and quite challenging phenomenon. Multiculturalism which assumes the acceptance of various diverse cultures / cultures is a sunnatullah that we cannot avoid. Therefore, a process is needed to always implement the acceptance by always trying to ground multiculturalism. The process can be done by inheriting culture / culture both through the process of socialization, enculturation, and internalization which starts from the smallest organ of society, namely individuals to large organs of society, namely educational institutions, community organizations and other government institutions. Education on the basis of multiculturalism assumes equal opportunities for each student to realize his full potential, preparing students to participate fully in an intercultural society, preparing teachers to facilitate effective learning regardless of similarities or cultural differences with him, the active participation of the school in eliminating oppression in all its forms, education must be centered on learners by listening to the aspirations and experiences of students, educators, activists, and others must take a more active role in reviewing all educational practices, including learning theory, teaching approaches, evaluation, psychology and guidance, educational material and textbooks, and others.*

Keywords: *multiculturalism, cultural inheritance, cultural education*

* Dosen tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar didunia, hal ini dapat dilihat dari sosio-kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Dengan jumlah yang ada di wilayah NKRI sekitar kurang lebih 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 230 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katholik, Kristen protestan, hindu, budha, konghucu, serta berbagai macam kepercayaan.

Pada masa orde baru (Orba), perbedaan tersebut dianggap memiliki potensi berbahaya yang akan menyebabkan kesatuan bangsa menjadi *chaos*. Realitas masyarakat dengan keragamannya direpresi dan didekontruksi sesuai dengan arah kebijakan Orba. Salah satunya dengan menyeragamkan dan menihilkan entitas budaya lokal yang akhirnya menjadi tabir terciptanya dialog antar kultur dari masyarakat adat yang berbeda.

Pasca pemerintah Orba, kita banyak menyaksikan tragedi kemanusiaan yang demikian memilukan. Konflik berbau suku, agama, ras dan antar golongan, seperti yang terjadi di Aceh, Ambon, Papua, Kupang, Dayak, dan beberapa daerah lainnya adalah realitas empirik yang mengancam integrasi bangsa di satu sisi, namun membutuhkan solusi konkret dalam penyelesaiannya di sisi lain.

Ide multikulturalisme menurut Taylor¹ adalah gagasan mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*). Lebih jauh lagi, gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran, masyarakat adat, dan lain-lain. Sedangkan Suparlan² menjelaskan multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Secara mudah dapat dikatakan, multikulturalisme merupakan

¹ Taylor, Charles, dkk. 1994. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton. Hal. 34

² Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII, No. 72, Jakarta: Universitas Indonesia – Yayasan Obor Indonesia. Hal. 59

suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan. Meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan, namun tidak ada masyarakat kelas, karena multikulturalisme mengakui adanya politik universalisme yang menekankan persamaan hak, kewajiban, dan harga diri.

Sebagai sebuah ide, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi sosial yang ada dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, yang tercakup dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kekegiatan lain yang bersinggungan dengan masyarakat, termasuk agama. Di samping itu, multikulturalisme mau tidak mau harus menjelaskan berbagai permasalahan mengenai politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum (*law enforcement*), HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, serta prinsip-prinsip etika moral, dan beragama.

Yang diajarkan dalam semangat multikulturalisme bukan semangat ketunggalan (*tunggal ika*) yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat, tetapi lebih menekankan pada pengakuan adanya pluralitas (*bhinneka*) budaya bangsa yang lebih menjamin persatuan bangsa menuju pembaruan sosial yang demokratis. Untuk itu pengejawantahan konsep dasar multikulturalisme merupakan hal yang fundamental yang tidak bisa ditawar dan cara yang paling efektif adalah melalui pewarisan budaya dan juga melalui pendidikan.

Pewarisan budaya adalah suatu proses, perbuatan atau cara mewarisi budaya di dalam masyarakat. Proses tersebut dinamakan juga socialitation. Dalam proses tersebut seorang individu mengalami pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan kelompoknya. Budaya diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Hanya saja dalam proses pewarisan budaya menghendaki adanya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Malinowski menyebutnya Cultural Determinism artinya segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh budaya yang dimiliki masyarakat.

Sedangkan pendidikan multikulturalisme adalah upaya penyadaran kultural kepada setiap individu, yang didasarkan pada kultur masyarakat masing-masing. Karena setiap masyarakat dipastikan mempunyai kerangka nilai, norma, aturan, budaya yang berbeda, sehingga sewaktu-waktu akan menyebabkan pertentangan dan persinggungan kepentingan,

baik budaya, politik, ekonomi, maupun sosial. Perbedaan kepentingan inilah yang apabila tidak dimaknai secara bijak akan memicu konflik.

MENEGUHKAN KONSEP MULTIKULTURALISME

Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”. Istilah multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdiri dari keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda. Selanjutnya dalam khasanah keilmuan, istilah multikultural ini dibedakan ke dalam beberapa ekspresi yang lebih sederhana, seperti pluralitas (*plurality*) mengandaikan adanya “hal-hal yang lebih dari satu (*many*)”, keragaman (*diversity*) menunjukkan bahwa keberadaan yang “lebih dari satu” itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tidak dapat disamakan, dan multikultural (*multicultural*) itu sendiri.³

Secara epistemologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Peningkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengertian multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu “multi” yang berarti jamak atau plural, dan “kultural” yang berarti kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan sekedar pengakuan akan adanya hal yang berjenis-jenis tetapi pengakuan tersebut memiliki implikasi politis, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam pengertian tradisional tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama; pertama, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*). Kedua, legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Dalam gelombang pertama multikulturalisme yang esensi terhadap perjuangan kelakuan budaya yang berbeda (*the other*)⁴.

³ Lihat Choirul Mahfud. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 75

⁴ Watson, C.W. 2000. *Multiculturalism*. London: Open University Press. Hal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hernandes⁵, bahwa multikulturalisme adalah bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi. Pengertian ini mengajak kita untuk lebih arif melihat perbedaan dan usaha untuk bekerjasama secara positif dengan yang berbeda. Disamping untuk terus mewaspadaikan segala bentuk-bentuk sikap yang bisa mereduksi multikulturalisme itu sendiri. Lebih jauh, Suparlan⁶ memberikan penekanan, bahwa multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kebudayaan. Yang menarik disini adalah penggunaan kata ideologi sebagai penggambaran bahwa betapa mendesaknya kehidupan yang menghormati perbedaan, dan memandang setiap keberagaman sebagai suatu kewajaran serta sederajat.

Lebih lanjut Suparlan⁷ mengutip Fay, Jary dan Jary (1991), Watson (2000) dan Reed menyebutkan bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Dari gambaran pemahaman tentang multikultural yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa inti dari konsep multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa,

⁵ Hernandez, Hilda. 1989. *Multicultural Education: A Teacher Guide To Linking Context, Process, and Content*, New Jersey & Ohio : Prentice Hall. Hal. 371

⁶ Suparlan, Parsudi. 2005. *Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: Grasindo. Hal. 164

⁷ Suparlan, Parsudi. 2005. *Sukubangsa* Hal. 168

ataupun agama. Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), maka multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.

Kesadaran akan adanya keberagaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Akan tetapi tentu, tidak cukup hanya sampai disitu. Bahwa suatu kemestian agar setiap kesadaran akan adanya keberagaman, mesti ditingkatkan lagi menjadi apresiasi dan dielaborasi secara positif. Oleh karenanya multikulturalisme adalah sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat problem minoritas (*minority groups*) *vis a vis* mayoritas (*majority group*), yang di dalamnya ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan, persamaan (*equality*), kesetaraan, dan keadilan (*justice*)⁸.

Pike memakai istilah *emic* dan *etic* untuk menjelaskan dua sudut pandang dalam mempelajari perilaku multikultural. *Ethic* merupakan titik pandang dalam mempelajari budaya dari luar sistem budaya itu, dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem budaya yang asing. Sedangkan *emic* merupakan titik pandang dari dalam sistem budaya tersebut. *Ethic* menjelaskan universalitas suatu konsep kehidupan sedangkan *emic* menjelaskan *keunikan* dari sebuah konsep budaya.⁹

Menurut Watson¹⁰, membicarakan masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Pada hakikatnya masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya (*culture*) yang berbeda-beda. Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak

⁸ Tilaar, H.A.R. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta : Grasindo. Hal. 80

⁹ Pike, Kenneth L. 1967. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior*. The Hague: Mouton. Hal. 28

¹⁰ Watson, C.W. 2000. *Multiculturalism*. London: Open University Press. Hal. 26

bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antarindividu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial dan politiknya.

Menurut Parekh¹¹, ada tiga bentuk keragaman budaya yang paling umum dijumpai dalam masyarakat modern, yaitu:

1. Keanekaragaman sub-budaya (*subcultural diversity*).

Meskipun warga masyarakat sama-sama menganut dan meyakini sebuah kultur yang kurang lebih sama, namun mereka tidak menjalankan keyakinan dan praktek-prakteknya secara sama dalam sejumlah aspek kehidupan yang penting. Yang termasuk golongan ini misalnya: kaum gay dan lesbian, budaya anak muda (*youth culture*), orang-orang yang mengikuti gaya hidup atau struktur kekeluargaan yang tidak konvensional. Meskipun mungkin terlihat kurang lumrah, namun mereka merasa bahagia dalam menjalankan pola-pola budaya seturut pandangan mereka yang khas ini di dalam sebuah kultur yang dominan.

2. Keanekaragaman perspektif (*perspectival diversity*).

Sejumlah warga masyarakat teramat kritis dalam menyikapi atau menanggapi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari budaya yang dominan dan mereka berupaya untuk menyusun kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan tersebut agar menjadi lebih seimbang (tidak berat sebelah dan memberi ruang untuk 'suara yang lain'). Contohnya, kaum feminis yang mengkritik bias-bias patriarkal yang sudah mengurat akar dalam struktur dan budaya masyarakat di mana mereka hidup. Kaum fundamentalis religius mengkritik orientasi sekuler dari masyarakatnya. Kaum pecinta lingkungan mengkritik pandangan yang terlalu berpusat pada manusia dan mengeksploitasi alam (pandangan antropomorfis dan teknosentris), sementara orang kulit hitam mengkritik bias rasisme. Kelompok-kelompok masyarakat ini tidak bisa disebut subkultur karena mereka mempertanyakan dan menantang pondasi paling dasar dari kultur yang eksis sampai saat itu, dan mereka pun bukan komunitas budaya yang khusus

¹¹ Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 192

yang hidup menurut nilai-nilai dan pandangan-pandangan tertentu tentang dunia yang hanya dianut oleh kelompok mereka dan tidak oleh kelompok lain. Sebaliknya, mereka mengembangkan perspektif yang khas tentang bagaimana kultur bersama itu harus ditata ulang, di-rekonstitusi.

3. Keanekaragaman komunal (*communal diversity*).

Di dalam masyarakat modern juga terdapat sejumlah komunitas yang sadar-diri, yang cukup rapi terorganisasi dan yang percaya sekaligus menghidupi kepercayaan itu lewat praktek-praktek tertentu secara berbeda-beda. Yang termasuk golongan ini adalah kaum imigran yang baru saja datang, sejumlah komunitas yang sudah cukup lama berdiri dan mapan, seperti kaum Yahudi, kaum Gipsi, komunitas-komunitas religius yang beraneka ragam, dan kelompok-kelompok budaya yang dibatasi secara teritorial seperti penduduk asli (adat) sebuah daerah, kelompok Basques di Spanyol, dan Québécois di Kanada. Golongan ketiga ini disebut keragaman komunal.

Jadi, ringkasnya, menurut Parekh, dalam masyarakat modern sekarang ini (*contemporary modern society*) ada tiga kategori keanekaragaman golongan yang hidup dan mewarnai masyarakat, yaitu (1) keanekaragaman subkultur, (2) keanekaragaman perspektif dan (3) keanekaragaman komunal. Masyarakat yang mempunyai ketiga unsur golongan ini dalam komposisinya, dan terutama yang menunjukkan keanekaragaman tipe yang kedua dan ketiga, disebut Parekh sebagai “masyarakat multikultural.”

Dengan demikian, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mencakup dua atau lebih komunitas budaya seperti dimaksud di kategori ketiga (keanekaragaman komunal). Ada dua model kemungkinan untuk menanggapi kemajemukan budaya ini. Pertama, kemajemukan dipersilakan dan bahkan dirayakan. Kemajemukan dianggap sentral untuk mengembangkan pemahaman diri baik individu maupun warga masyarakat. Kemajemukan dihormati, tidak hanya lewat tutur kata melainkan juga lewat hukum dan kebijakan yang sengaja dibuat untuk menjamin kemajemukan tersebut. Kedua dengan mengembangkan kebijakan asimilasi, di mana kemajemukan budaya, dengan satu atau lain cara, diupayakan untuk dilebur (diasimilasi) ke dalam budaya yang

dominan (*mainstream*), entah sebagian saja atau seluruhnya. Model tanggapan yang pertama, disebut multikulturalis, sementara model tanggapan yang kedua disebut monokulturalis. Multikulturalitas dengan demikian mengacu pada fakta kemajemukan budaya (*cultural plurality*) sementara multikulturalisme adalah tanggapan normatif terhadap fakta tersebut.

Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbedabeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan multicultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain, keragaman struktur budaya yang berakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda-beda, keragaman ras, suku, dan agama, keragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh, dan lain-lain, serta keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.

Bagi Indonesia, multikultural merupakan suatu strategi dan integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam mengatasi setiap isu-isu separatisme dan disintegrasi sosial. Multikulturalisme mengajarkan semangat kemanunggalan atau ketunggalan (*tunggal ika*) yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat, tetapi pengakuan adanya pluralitas (*Bhinneka*) budaya bangsa inilah yang lebih menjamin persatuan bangsa.

KONSEPSI PEMBUMIHAN MULTIKULTURALISME

1. Pewarisan Budaya

Di dalam masyarakat kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam wujud kebudayaan yang bersifat abstrak terdapat berbagai macam aturan norma sosial yang harus diterima oleh individu yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan yang bersifat abstrak berbentuk norma dan nilai-nilai adat tersebut diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar kebudayaan.

Di dalam masyarakat, unsur kebudayaan diwariskan secara turun-temurun yang membutuhkan waktu dalam proses pewarisannya. Dalam antropologi pewarisan nilai-nilai budaya diidentikkan dengan proses belajar karena manusia akan belajar menerima unsur-unsur budaya yang lama dan belajar untuk menyeleksi unsur kebudayaan yang tepat bagi kehidupannya. Dengan demikian, pengetahuan pewarisan budaya adalah proses belajar kebudayaan yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia.

Dalam masyarakat tradisional dan modern tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam proses pewarisan atau belajar kebudayaan karena setiap manusia akan mengalami proses belajar kebudayaannya sendiri yang diajarkan secara turun-temurun. Misalnya, anak-anak akan belajar bagaimana cara makan dengan benar, memegang sendok yang benar, berbicara dengan sopan, dan bergaul dengan orang lain dengan wajar.

Dalam masyarakat pedesaan peran keluarga sangat penting dan menjadi inti pembentukan perilaku individu. Ibu dan ayah adalah orang yang pertama kali mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara bersalaman dan mencium tangan orang yang lebih tua dan bagaimana cara melakukan ritual keagamaan. Dalam masyarakat perkotaan kecenderungan tersebut semakin jarang terjadi karena kedua orang tua sibuk bekerja sehingga yang mengajarkan pada anak bersosialisasi dengan kehidupannya adalah pengasuh anak atau anggota keluarga yang lain.

Dari sini dapat dikatakan bahwa pewarisan budaya merupakan suatu proses peralihan nilai-nilai dan norma-norma yang dilakukan dan diberikan melalui pembelajaran oleh generasi tua ke generasi yang muda yang bertujuan untuk pengenalan nilai, norma, dan adat istiadat dalam hidup, terciptanya keadaan yang tertib, tenang harmonis dalam masyarakat.

Proses pewarisan budaya antargenerasi tersebut dilakukan melalui proses sosialisasi dan enkulturasi dalam keluarga dan masyarakat.

1. Sosialisasi, adalah proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial.¹² Dalam proses sosialisasi seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan berbagai individu di sekelilingnya yang menduduki

¹² *Koentjaraningrat*. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 98

berbagai peranan social dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, individu mulai berhubungan dengan individu lain di sekitar lingkungan kehidupannya dan belajar bagaimana untuk bertindak atau berbudaya di dalam masyarakat. Di dalam proses sosialisasi seseorang akan belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya.

Dalam proses sosialisasi yang berlangsung sepanjang rentang hidup manusia sejak ia dilahirkan sampai akhir hayatnya, seseorang akan selalu belajar kebudayaan dan sistem sosial yang melingkupinya. Proses sosialisasi berkaitan erat dengan enkulturasi atau proses pembudayaan. Biasanya proses sosialisasi dan enkulturasi dapat berlangsung secara bersamaan dalam diri seorang individu sehingga kepribadiannya terbentuk sesuai dengan kepribadian masyarakatnya. Proses sosialisasi dan enkulturasi berlangsung dari generasi tua pada generasi muda melalui tahapan tertentu. Misalnya, seorang anak mempelajari kehidupan dimulai dari lingkungan keluarganya, kemudian meluas ke tetangga, teman sebaya, sekolah, lingkungan kerja, hingga diperoleh suatu status dalam pergaulan hidup.

2. Enkulturasi, adalah proses individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.¹³ Secara tidak langsung seorang individu sudah mulai memperoleh pewarisan kebudayaan dalam kehidupannya karena menyesuaikan diri dan bersikap sesuai dengan tuntutan norma atau adat kebudayaan yang berlaku di masyarakatnya.

Sejak kecil proses enkulturasi sudah dimulai oleh warga masyarakat, dimulai di dalam lingkungan keluarganya dan teman-temannya bermain. Pada awalnya individu belajar meniru berbagai macam tindakan orang-orang di sekitarnya sehingga tindakannya menjadi suatu pola yang teratur dan norma yang mengatur tindakannya ditetapkan. Selain itu, berbagai norma yang ada dipelajari seorang individu dengan mendengarkan pembicaraan orang lain mengenai berbagai norma tersebut dalam lingkungan pergaulannya pada saat

¹³ Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ...* Hal. 99

yang berbeda-beda.¹⁴

3. Internalisasi, adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai dari lahir hingga akhir hayat nya. Sepanjang hayat nya seseorang terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat nafsu, dan emosi kemudian menjadi sebuah kepribadian.

Proses pewarisan unsur-unsur budaya itu tentu saja mempunyai sarana atau saluran-saluran dalam rangka pembudayaan kepada generasi muda oleh generasi tuanya. Sarana saluran yang umum dijumpai dalam suatu masyarakat, antara lain lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pemerintahan, perkumpulan, institusi resmi dan media massa.

1. Keluarga

Keluarga merupakan sarana pewarisan budaya yang pertama dan utama adalah lingkungan keluarga oleh orang tua (ayah dan ibu). Melalui ayah dan ibunya di lingkungan keluarga seorang anak mengenal dunianya melalui proses internalisasi (belajar menanamkan kepribadian), sosialisasi (proses mempelajari nilai-nilai, norma, peranan, dan pola-pola tindakan dalam interaksi sosial yang diperlakukan) dan enkulturasi (proses belajar budaya melalui pembelajaran norma-norma sosial budaya serta pola-pola tindakan dalam interaksi sosial agar menjadi milik pribadinya). Suasana keluarga dan kegagalan orang tua dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan sehat dalam proses pewarisan budaya kepada anak-anaknya tentu saja akan berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian anak-anaknya itu.

2. Masyarakat

Setelah semakin besar seorang anak akan memperoleh pengaruh dari kelompok sepermainannya di lingkungan tetangganya. Proses ini biasanya akan berlangsung hingga ia remaja, maka ia juga melakukan proses internalisasi, sosialisasi dan inkulturasi. Namun adakalanya pengaruh teman sepermainan itu kurang baik, kemungkinan peranan yang kurang baik itulah yang perlu dicegah oleh para orang tua di masyarakatnya agar tidak mengarahkan anak mengembangkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial-budaya.

¹⁴ Koentjaraningrat. *Pengantar ...* Hal. 102

3. Sekolah/Pendidikan¹⁵

Apabila dalam lingkungan keluarga dan masyarakat pewarisan budaya itu dilakukan secara informal maka di sekolah proses pewarisan unsur-unsur budaya diselenggarakan secara formal. Padahal kikatnya proses pembudayaan nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya secara resmi, berencana dan berkesinambungan oleh pemerintah melalui para guru yang dipercayakan untuk mendidik murid-muridnya.

4. Lembaga Pemerintahan

Berbagai departemen dan instansi-instansi di bawahnya yang ada di Negara Indonesia, seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan Industriserta Lembaga-lembaga Pemerintahan, semua itu merupakan sarana-sarana formal dalam proses pewarisan budaya masyarakat Indonesia.

Lembaga-lembaga tersebutlah secara resmi merupakan lembaga pengambilan kebijaksanaan dalam proses pembudayaan sistem sosial dan sistem budaya dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila UUD 1945. Sebagai penentu dan pengambilan kebijaksanaan maka lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga Negara tersebut berfungsi dan berperan sebagai sarana pewaris unsur-unsur budaya masyarakat Indonesia. Intidari kebudayaan masyarakat Indonesia adalahPancasila UUD 1945 maka lembaga-lembaga pemerintahan atau Negara berusaha membudayakan atau mengamalkan Pancasila sebagai inti kebudayaan bangsa Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia.

5. Perkumpulan

Perkumpulan sebagai organisasi sosial yang terbentuk dan dibentuk oleh masyarakat pada dasarnya berperan sebagai pewaris kebudayaan masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati dan dibuat bersama pula.

6. Institusi Resmi

Institusi resmi berarti lembaga yang bersifat resmi yang memiliki AD/ART danperbedaanhukum. Koperasi, KNPI, OSIS, GOLKAR, PDI, PPP, PKB, PGRI, ICMI, IDI, NU, Muhammadiyah, Kosgoro dan

¹⁵ Akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

sejenisnya adalah perwujudan kongkret. Berbagai institusi resmi itu dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk bekerjasama mempertahankan, mengembangkan, dan membudayakan komponen-komponen sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

7. Media Massa

Sarana pewarisan budaya yang sangat penting peranannya dalam masyarakat modern adalah media massa. Baik yang bersifat media visual maupun media cetak berfungsi efektif dalam proses pembudayaan unsur-unsur sistem sosial-budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat

2. Pendidikan Multikultural

Akar pendidikan multikultural, berasal dari perhatian seorang pakar pendidikan Amerika Serikat Prudence Crandall¹⁶ yang secara intensif menyebarkan pandangan tentang arti penting latar belakang peserta didik, baik ditinjau dari aspek budaya, etnis, dan agamanya. Pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik merupakan cikal bakal bagi munculnya pendidikan multikultural.

Secara etimologi istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik. Dan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan¹⁷.

Sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama). Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-

¹⁶ Lihat Presma, 2004, *Pendidikan Islam dan tantangan Globalisasi Buah Pikir Seputar, Filsafat Politik Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hal. 264.

¹⁷ Dody S. Truna. 2010. *Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme*. Jakarta: Kementerian Agama RI. Hal. 50.

tingginya terhadap harkat dan martabat manusia¹⁸.

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, rasionalisme, agama dan budaya seperti di Indonesia. Sedangkan wacana tentang pendidikan multikultural, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire¹⁹, pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.

Selanjutnya Banks²⁰, mengatakan bahwa substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*as education for freedom*) sekaligus sebagai penyebarluasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama (*as inclusive and cementing movement*).

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar²¹ mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan

¹⁸ Dody S. Truna. 2010. *Pendidikan Islam*Hal. 50.

¹⁹ Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj: Agung Prihantoro. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 271

²⁰ Banks, James A. 1997. *Educating Citizens in a Multicultural Society*. New. York and London: Teacher College Press. Hal. 318

²¹ Tilaar, H.A.R. 2004. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani*. Bandung: Remaja. Rosdakarya. Hal. 183

orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Melihat dan memperhatikan pengertian pendidikan multikultural di atas, dapat diambil beberapa pemahaman, antara lain; *pertama*, pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pengembangan yang berusaha meningkatkan sesuatu yang sejak awal atau sebelumnya sudah ada. Karena itu, pendidikan multikultural tidak mengenal batasan atau sekat-sekat sempit yang sering menjadi tembok tebal bagi interaksi sesama manusia; *Kedua*, pendidikan multikultural mengembangkan seluruh potensi manusia, meliputi, potensi intelektual, sosial, moral, religius, ekonomi, potensi kesopanan dan budaya. Sebagai langkah awalnya adalah ketaatan terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang, penghargaan terhadap orang-orang yang berbeda dalam hal tingkatan ekonomi, aspirasi politik, agama, atau tradisi budaya. *Ketiga*, pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas adalah sebuah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. Dalam hal ini, pluralitas bukan hanya dipahami keragaman etnis dan suku, akan tetapi juga dipahami sebagai keragaman pemikiran, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman ekonomi, politik dan sebagainya. Sehingga tidak memberi kesempatan bagi masing-masing kelompok untuk mengklaim bahwa kelompoknya menjadi panutan bagi pihak lain. Dengan demikian, upaya pemaksaan tersebut tidak sejalan dengan nafas dan nilai pendidikan multikultural. *Keempat*, pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan. Sebab dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan transportasi telah melampaui batas-batas negara, sehingga tidak mungkin sebuah negara terisolasi dari pergaulan dunia. Dengan demikian, privilege dan privasi yang hanya memperhatikan kelompok tertentu menjadi tidak relevan. Bahkan bisa dikatakan “pembusukan manusia” oleh sebuah kelompok.

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indiference*” dan “*Non-recognition*” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial,

tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ‘ethnic studies’ untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subyek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadventaged.

Secara garis besar, paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus stereotipe, sikap dan pandangan egoistik, individualistik dan eksklusif di kalangan anak didik. Sebaliknya, dia senantiasa dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, rasionalisme, agama, budaya, dan kebutuhan. Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pendidikan multikultural diharapkan membantu para siswa dalam mengembangkan proses identifikasi (pengenalan) anak didik terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global. Pengenalan kebudayaan maksudnya anak dikenalkan dengan berbagai jenis tempat ibadah, lembaga kemasyarakatan dan sekolah. pengenalan suku bangsa artinya anak dilatih untuk bisa hidup sesuai dengan kemampuannya dan berperan positif sebagai salah seorang warga dari masyarakatnya. Sementara lewat pengenalan secara global diharapkan siswa memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana mereka bisa mengambil peran dalam percaturan kehidupan global yang dia hadapi.

Manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sepanjang hidupnya melaksanakan pendidikan. Bila pendidikan bertujuan membina manusia yang utuh dalam semua segi kemanusiaannya, maka semua segi kehidupan manusia harus bersinggungan dengan dimensi spiritual (teologis), moralitas, sosialitas, emosionalitas, rasionalitas (intelektualitas), estetis dan fisik. Namun realitanya, proses pendidikan kita masih banyak menekannkan pada segi kognitif saja, apalagi hanya nilai-nilai ujian yang menjadi standar kelulusan, sehingga peserta didik tidak berkembang menjadi manusia yang utuh. Akibat selanjutnya akan

terjadi beragam tindakan yang tidak baik seperti yang akhir-akhir ini terjadi: tawuran, perang, penghilangan etnis, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, korupsi, ketidakjujuran, dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keberadaan pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa sangat diperlukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pendidikan multikultural secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ada.
- b. Falsafah bangsa Indonesia adalah suka gotong royong, membantu, menghargai antara suku dan lainnya.
- c. Pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejala masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Keberhasilan pendidikan dengan mengabaikan ideologi, nilai-nilai, budaya, kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing suku dan etnis harus dibayar mahal dengan terjadinya berbagai gejala dan pertentangan antar etnik dan suku. Salah satu penyebab munculnya gejala seperti ini, adalah model pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada pendidikan kognitif intelektual dan keahlian psikomotorik yang bersifat teknis semata. Padahal kedua ranah pendidikan ini lebih mengarah kepada keahlian yang lepas dari ideologi dan nilai-nilai yang ada dalam tradisi masyarakat, sehingga terkesan monolitik berupa nilai-nilai ilmiah akademis dan teknis empiris. Sementara menurut pendidikan multikultural, adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, heterogenitas, pluralitas agama apapun aspeknya dalam masyarakat.
- d. Pendidikan multikultural menentang pendidikan yang berorientasi bisnis. Pendidikan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah pendidikan ketrampilan semata, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan, yang sering disebut kecerdasan ganda (*multiple intelligence*). Menurut Howard Gardner, kecerdasan ganda yang perlu dikembangkan secara seimbang adalah kecerdasan verbal linguistic, kecerdasan logika matematika, kecerdasan yang terkait dengan spasialRuang, kecerdasan fisik kinestetik, kecerdasan dalam bidang musik, kecerdasan yang terkait

dengan lingkungan alam, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Jadi, jika ketrampilan saja yang dikembangkan maka pendidikan itu jelas berorientasi bisnis.

- e. Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran perdamaian sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, pendidikan multikultural sekaligus untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis di lingkungan mereka.

Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, maka jenis pendidikan yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan multikultural. Pendidikan Multikultural menyangkut tiga hal yaitu :

1. Ide dan Kesadaran akan Nilai Penting Keragaman Budaya

Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda seperti usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan Multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua peserta didik tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bersama-sama belajar.

Keragaman budaya yang ada dalam dunia pendidikan di Indonesia akan memunculkan suatu sikap saling menghargai jika seorang individu tersebut mampu menyerap dan mengaplikasikan dengan baik adanya keragaman budaya. Sehingga diperlukan pentingnya kesadaran terhadap keragaman budaya yang ada. Hal tersebut merupakan keniscayaan atau kepastian adanya perbedaan, namun itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Artinya perbedaan itu perlu kita terima sebagai suatu kewajaran dan perlu sikap toleransi agar kita bisa hidup berdampingan secara damai tanpa melihat unsur yang berbeda itu untuk membeda-bedakan.

2. Gerakan Pembaharuan Pendidikan

Gerakan pembaharuan pendidikan yang dimaksud di atas ialah suatu gerakan perubahan yang diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Upaya-upaya/gerakan pembaharuan pendidikan sangat diperlukan, hal ini untuk menanggapi dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekarang

ini, selain itu untuk memperkembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Apabila upaya-upaya ini benar-benar dilakukan sesuai dengan bentuk upaya pendidikan seperti yang diuraikan di atas, tentunya hal ini harus diimbangi dengan kerja sama yang baik antara peserta didik, pendidik dan orang tua. Maka dunia pendidikan akan semakin maju dan berkembang.

Adanya karakteristik pada peserta didik memungkinkan untuk mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Beberapa karakteristik institusional dari pendidikan secara sistematis menolak peserta didik dengan karakteristik tertentu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, walaupun itu dibungkus secara halus dalam bentuk aturan tertentu. Terdapat kesenjangan yang muncul dengan fenomena munculnya sekolah favorit yang didominasi oleh orang kaya. Selain itu, adanya diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa yang kesulitan untuk berkecimpung dalam pemerintahan dan pertahanan. Pendidikan Multikultur bukan sekedar merupakan praktek aktual satu bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek pendidikan.

3. Proses Pendidikan

Pendidikan multikultural adalah proses menjadi yang harus dipandang secara terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai untuk memperbaiki prestasi secara utuh. Karena tujuan Pendidikan Multikultur tidak akan pernah tercapai secara penuh, kita seharusnya bekerja secara kontinyu meningkatkan persamaan pendidikan untuk semua peserta didik (*educational equality for all students*).

Menurut Paul Gorski²² pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif di dalam pendidikan akhir-akhir ini. Yang menjadi landasan pendidikan multikultural adalah persamaan pendidikan, keadilan sosial, dan dedikasi. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa dasar

²² Gorski. 2001. <http://www.aaanet.org/cae/aeq/br/gorski.htm>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 14:21 WIB

pendidikan multikultural:

- a. Kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mewujudkan potensi sepenuhnya,
- b. Penyiapan peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya,
- c. Penyiapan pengajar agar memudahkan belajar yang efektif tanpa memandang persamaan atau perbedaan budaya dengan dirinya,
- d. Partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuknya. Pertama-tama dengan menghilangkan penindasan di sekolahnya sendiri, kemudian menghasilkan lulusan yang sadar dan aktif secara sosial dan kritis,
- e. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman peserta didik,
- f. Pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktek pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi dan bimbingan, materi pendidikan dan buku teks, dan lain-lain.

Tujuan pendidikan multikultural dapat mencakup tiga aspek belajar (kognitif, afektif, dan tindakan) dan berhubungan baik nilai-nilai intrinsik (*ends*) maupun nilai instrumental (*means*) pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural mencakup:

1. Pengembangan Literasi Etnis dan Budaya

Salah satu alasan utama gerakan untuk memasukkan Pendidikan Multikultural dalam program pendidikan adalah untuk memperbaiki kelalaian dalam penyusunan kurikulum. *Pertama*, kita harus memberi informasi pada peserta didik tentang sejarah dan kontribusi dari kelompok etnis yang secara tradisional diabaikan dalam kurikulum dan materi pembelajaran, *kedua*, kita harus menempatkan kembali citra kelompok ini secara lebih akurat dan signifikan, menghilangkan bias dan informasi menyimpang yang terdapat dalam kurikulum.

Tujuan utama Pendidikan Multikultural adalah mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas.

2. Perkembangan Pribadi

Dasar psikologis Pendidikan Multikultural menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan pengalaman budaya dan kelompok etnis yang lain dapat memperbaiki penyimpangan yang menganggap nilai yang ada pada kelompok yang dominan itu lebih unggul.

3. Klarifikasi Nilai dan Sikap

Mengajari generasi muda untuk menghargai dan menerima pluralisme etnis, menyadari bahwa perbedaan budaya tidak sama dengan kekurangan atau rendah diri, dan untuk mengakui bahwa keragaman merupakan bagian integral dari kondisi manusia. Pengklarifikasian sikap dan nilai etnis didesain untuk membantu peserta didik memahami bahwa berbagai konflik nilai itu tidak dapat dielakkan dalam masyarakat pluralistik; dan bahwa konflik tidak harus menghancurkan dan memecah belah.

4. Kompetensi Multikultural

Upaya interaksi lintas kultural seringkali terhalang oleh nilai, harapan dan sikap negatif; kesalahan budaya (*cultural blunders*); dan dengan mencoba menentukan aturan etiket sosial (*rules of social etiquette*) dari satu sistem budaya terhadap sistem budaya yang lain. Pendidikan Multikultural dapat membantu peserta didik mempelajari bagaimana memahami perbedaan budaya tanpa membuat pertimbangan nilai yang semena-mena tentang nilai intrinsiknya.

5. Kemampuan Keterampilan Dasar

Tujuan utama Pendidikan Multikultural adalah untuk memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan ketrampilan dasar dari peserta didik yang berbeda secara etnis.

6. Persamaan dan Keunggulan Pendidikan

Pendidik harus memahami secara keseluruhan bagaimana budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan pendidikan. Dengan memberikan pilihan yang lebih tentang bagaimana mereka akan belajar akan membantu memaksimalkan prestasi belajar mereka. Tujuan multikultural untuk mencapai persamaan dan keunggulan pendidikan mencakup kognitif, afektif dan ketrampilan perilaku, di samping prinsip demokrasi (Banks,

1993).

7. Memperkuat Pribadi Untuk Reformasi Sosial

Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk memulai perubahan dari lingkungan pendidikan dan meluas pada lingkungan masyarakat. Pada diri peserta didik sebagai agen perubahan social ditanamkan nilai, sikap, kebiasaan, dan keterampilan agar mereka menjadi agen perubahan yang berkomitmen kuat dalam memberantas perbedaan etnis dan rasial. Tujuan dan pengembangan ketrampilan ini didesain untuk membuat masyarakat lebih benar-benar egaliter dan lebih menerima pluralisme kultural.

Fungsi multikulturalisme ini adalah apa yang dimaksudkan Banks dengan pendekatan aksi sosial dari Pendidikan Multikultural, yang mengajari peserta didik bagaimana menjadi kritikus sosial (*social critics*), aktivis politik (*political activists*), agen perubahan change agents), dan pemimpin yang berkompeten dalam masyarakat dan yang berbeda secara etnis dan pluralistik secara kultural.

8. Memiliki Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Kokoh

Multikultural perlu menambahkan materi, program dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi dan stereotipe.

9. Memiliki Wawasan Hidup yang Lintas Budaya dan Lintas Bangsa sebagai Warga Dunia

Hal ini berarti individu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia (world citizen). Namun peserta didik harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya. Mahasiswa diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya – act locally and globally.

10. Hidup Berdampingan Secara Damai

Dengan melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan akan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain dan pada gilirannya dapat hidup berdampingan secara damai.

Agar semua itu tercapai, maka ada empat pendekatan pendidikan

multikultural yang dapat diterapkan pendidik²³, yaitu:

1. *Human relations approach*, yaitu model pengajaran yang menekankan perkembangan konsep diri yang positif dan juga minat para siswa. Pada pendekatan ini, siswa belajar mengenai persamaan dan perbedaan antara masyarakat dan cara bagaimana membangun keterampilan sosial. Peran pengajar di sini adalah mendorong para siswa untuk mempelajari kesamaan dan perbedaan di antara mereka dan menghindarkan mereka menyakiti perasaan orang lain.
2. *Single groups study approach*, yakni model pengajaran yang menekankan self-exploration dari elemen-elemen dan sumber-sumber budaya. Prinsip dasarnya adalah bahwa kalau kita ingin merangkul perbedaan, kita harus mengerti diri sendiri terlebih dahulu. Di sini, para siswa didorong untuk menjelajah elemen-elemen dan sumber-sumber budayanya.
3. *Transformative multi-cultural education model*, adalah model pengajaran yang terfokus pada nilai-nilai perbedaan. Pengajar menghadirkan sejumlah perspektif budaya. Melalui model ini, para siswa belajar mengenai kontribusi dan karakteristik dari berbagai kebudayaan yang berbeda, melalui literatur yang multi-kultural, pengalaman-pengalaman multi-linguistik, dan berbagai nara sumber. Penekanannya di sini adalah bahwa perbedaan itu suatu hal yang bagus.
4. *Antibias education*, yaitu model pengajaran yang menekankan perbedaan dari masyarakat dan strategi penyelesaian masalah. Salah satu contohnya adalah usaha pengajar yang bekerja dengan para siswa yang berbeda secara linguistik.

Dalam operasionalisasinya, Boutte & McCormick²⁴ menyarankan beberapa hal sebagai komponen dasar untuk meningkatkan ruang kelas yang multi-kultur, yaitu:

1. Modeling dari pengajar, bila para pengajar menunjukkan bahwa

²³ Parsons, R. D., Hinson, S. L., & Sardo- Brown, D. 2001. *Educational Psychology A Practitioner - Researcher Model of Teaching*. Belmont: Wadsworth Thomson Learning. Hal. 239

²⁴ Lihat Henson, Kenneth T. & Ben F Eller. 1999. *Educational Psychology for Effective. Teaching*. Afrika: Wadsworth Publishing Company. Hal. 392

- mereka menilai orang-orang dari karakteristik dan latar belakang yang berbeda, maka siswa akan merasakan dan mengikuti sikap ini.
2. Memasukkan kebudayaan dalam kurikulum, dalam hal ini kurikulum harus memasukkan adat atau kebiasaan agama, musik, seni, dan literatur yang menggambarkan berbagai kebudayaan.
 3. Literatur multi-kultur, Para pengajar harus menggunakan literatur yang menampilkan perbedaan gender dan anak-anak dengan ras yang berbeda dan lingkungan rumah.
 4. Pengalaman multi-kultur, dengan menambahkan kurikulum dengan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, pengajar dapat mendidik siswanya untuk menghargai perbedaan bahasa.
 5. Nara sumber dari budaya yang berbeda, keluarga atau anggota komunitas yang bersedia, dapat diundang ke kelas untuk berbagi kebudayaan.

PENUTUP

Proses pembumian multikulturalisme merupakan sebuah fenomena yang menarik dan cukup menantang. Multikulturalisme yang mengasumsikan pada adanya keberterimaan terhadap berbagai kultur/ budaya yang beragam merupakan *sunnatullah* yang kita tidak bisa mengelakkannya. Oleh karena itu diperlukan proses untuk senantiasa mengimplementasikan keberterimaan tersebut dengan senantiasa berusaha membumikan multikulturalisme.

Proses tersebut bisa dilakukan dengan pewarisan budaya baik dengan proses sosialisasi, enkulturasi, maupun internalisasi yang dimulai dari organ terkecil masyarakat yaitu individu sampai dengan organ-organ besar masyarakat yaitu lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Selain itu salah satu organ yang dipandang memiliki peran signifikan dalam mengejawantahkan multikulturalisme adalah pendidikan. Pendidikan dengan basis multikulturalisme mengasumsikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mewujudkan potensi sepenuhnya, penyiapan peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya, penyiapan pengajar agar memudahkan belajar yang efektif tanpa memandang persamaan atau perbedaan budaya dengan

dirinya, partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuknya, pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman peserta didik, pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktek pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi dan bimbingan, materi pendidikan dan buku teks, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, James A. 1997. *Educating Citizens in a Multicultural Society*. New York and London: Teacher College Press.
- Choirul Mahfud. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dody, S. Truna. 2010. *Pendidikan Islam Berwawasan Multikulturalisme*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj: Agung Prihantoro. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gorski. 2001. <http://www.aaanet.org/cae/aeq/br/gorski.htm>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 14:21 WIB
- Henson, Kenneth T. & Ben F Eller. 1999. *Educational Psychology for Effective Teaching*. Afrika: Wadsworth Publishing Company.
- Hernandez, Hilda. 1989. *Multicultural Education: A Teacher Guide To Linking Context, Process, and Content*, New Jersey & Ohio : Prentice Hall.
- Islam, M. H. 2017. *Diversity and Multicultural*. Humanistika: Jurnal Keislaman, 3(1), 83-103.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Parsons, R. D., Hinson, S. L., & Sardo-Brown, D. 2001. *Educational Psychology A Practitioner - Researcher Model of Teaching*. Belmont: Wadsworth Thomson Learning.
- Pike, Kenneth L. 1967. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior*. The Hague: Mouton.
- Presma, 2004, *Pendidikan Islam dan tantangan Globalisasi Buah Pikir Seputar, Filsafat Politik Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII, No. 72, Jakarta: Universitas Indonesia – Yayasan Obor Indonesia.

- Suparlan, Parsudi. 2005. *Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: Grasindo.
- Taylor, Charles, dkk. 1994. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta : Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Watson, C.W. 2000. *Multiculturalism*. London: Open University Press.